

**ANALISIS GEROMBOL (*CLUSTER ANALYSIS*)
UNTUK IDENTIFIKASI KANTONG KEMISKINAN
DI KABUPATEN BANGKALAN**

ABSTRAK

*Pembelakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menuntut pemerintah daerah (pemda) kabupaten berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Peta Kemiskinan dibutuhkan sebagai acuan untuk memastikan ketepatan sasaran berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan memanfaatkan data sekunder, penelitian ini ditujukan untuk (1) mengidentifikasi indikator kemiskinan regional berbagai sektor yang akan dijadikan sebagai acuan pemetaan kemiskinan dan (2) pemetaan kemiskinan dengan analisis gerombol dan teknik skoring nilai standard baku (*Z-score*).*

Dengan menggunakan 45 indikator kemiskinan yang teridentifikasi, kantong kemiskinan di Kabupaten Bangkalan adalah Kecamatan Kokop, Modang, Blega, Gulis, Tanah Merah, Socah, Burneh, Arosbaya, Geger, dan Konang. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kesenjangan sangat nyata antara gerombol kecamatan miskin dan tidak miskin, sementara variasi antar gerombol miskin relatif kecil (kemiskinan hampir merata di seluruh Kabupaten Bangkalan). Karenanya, disarankan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memprioritaskan pembangunan pada kecamatan miskin (kantong kemiskinan) dan membangun aspek dan indikator kemiskinan yang memiliki nilai 'terendah'/'terjelek'.

Kata Kunci: indikator kemiskinan regional, *cluster analysis*, peta kemiskinan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari negara di dunia yang ingin mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs), pemerintah Indonesia berkomitmen memerangi kemiskinan sehingga diciptakanlah berbagai

program penanggulangan kemiskinan. Sayangnya, pelaksanaan berbagai program tersebut tidak lepas dari segala permasalahan, seperti tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, dan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (Insan Hitawasana Sejahtera, 2004).

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan harapan baru untuk pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang lebih baik, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan UU tersebut, pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dituntut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Pemda yang diasumsikan lebih mengetahui dan memahami kondisi daerahnya diharapkan dapat melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah Kabupaten (pemkab) Bangkalan adalah salah satu daerah otonom yang sangat serius menangani masalah kemiskinan di daerahnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan mengeluarkan data bahwa penduduk miskin Kabupaten Bangkalan tahun 2006 sebesar 93.356 KK atau 365.951 jiwa (sekitar 39%) dari jumlah penduduk keseluruhan (Bappeda, 2007). Bahkan data Dinas Keluarga Berencana – Keluarga Sejahtera (KB-KS) Kabupaten Bangkalan memperlihatkan bahwa tahun 2005 jumlah keluarga miskin (gakin) sebesar 149.949 atau 68,64% (BPS, 2006). Bentuk keseriusan tersebut dicerminkan dengan dimasukkannya upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMMD), Strategi maupun

langkah-langkah penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan telah disusun dan dilakukan.

Dari sebuah pertemuan multistakeholder yang diselenggarakan di Bappeda Kabupaten Bangkalan pada tanggal 20 Maret 2007 diketahui bahwa Pemkab Bangkalan masih memiliki kendala tersendiri dalam menanggulangi kemiskinan ini. Pertama, belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD). Kedua, setiap sektor menggunakan indikator kemiskinan masing-masing (beragam) sebagai patokan dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kemiskinan secara sektoral. Di lain pihak, disadari bahwa kemiskinan adalah permasalahan yang multidimensi dan multi sektor. Penanggulangan kemiskinan harus merupakan upaya lintas sektoral dan multistakeholders/pelaku. Karenanya, dibutuhkan tim, dalam hal ini TKPKD, yang mampu mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dibutuhkan indikator kemiskinan yang disepakati oleh semua sektor dan peaku sebagai dasar penentuan wilayah atau pun individu/rumahnya miskin. Untuk turut menyumbang ide pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, penelitian yang berjudul 'Analisis Gerombol (*Cluster Analysis*) untuk Identifikasi Kantong Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan' ini dilakukan.

1.2. Tujuan

Penelitian ini ditujukan untuk:

- (1) Mengidentifikasi indikator kemiskinan regional berbagai sektor yang akan dijadikan sebagai dasar pembuatan peta kemiskinan.

- (2) Membuat peta kemiskinan Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan analisis gerombol (*cluster analysis*);

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indikator Kemiskinan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan tradisional mengistilahkan pembangunan sebagai peningkatan kapasitas perekonomian nasional sehingga mengukuhkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama suatu pembangunan (Todaro 1998). Karenanya, tidak mengherankan jika indikator pertumbuhan ekonomi. Seiring kesadaran internasional maupun nasional bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seluruhnya, maka tujuan ekonomi menjadi bukan satu-satunya tujuan dalam pembangunan. Pembangunan harus berkelanjutan, dimana manfaat atau kesejahteraan yang didapat dari pembangunan harus dirasakan sama oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Tomar, dkk., 1996). Di sinilah konsep pembangunan berkelanjutan mulai diadopsi, yaitu bahwa pembangunan harus memiliki tiga tujuan sekaligus yang sama pentingnya, yaitu tujuan ekonomi, sosial dan ekosistem/lingkungan.

Secara umum, Bappenas (2004 dalam Gregorius, 2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun

perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Konvensi internasional tentang tujuan pembangunan millenium, dikenal dengan MDGs, juga memasukkan tujuan sosial dan lingkungan selain tujuan ekonomi. Penurunan kemiskinan, isu kesetaraan gender, pemberantasan buta huruf dan penyakit menular menjadi isu-isu sentral dalam MDGs tersebut.

2.2. Indikator Kemiskinan Berbagai Lembaga

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinator perencanaan pembangunan di tingkat nasional merumuskan 12 indikator utama kemiskinan berdasarkan definisi dan pendekatan untuk memahami kemiskinan. Kedua belas indikator tersebut adalah: (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.

The World Bank/Bank Dunia (2003 dalam Gregorius, 2007) juga memiliki pendapat sendiri tentang kemiskinan dari sisi penyebab kemiskinan itu sendiri. Indikator utama kemiskinan yang dirumuskan

Bank Dunia adalah: (1) keterbatasan kepemilikan tanah dan modal; (2) terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan; (3) pembangunan yang bias kota; (4) perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat; (5) perbedaan sumberdaya manusia dan sektor ekonomi; (6) rendahnya produktifitas; (7) budaya hidup yang jelek; (8) tata pemerintahan yang buruk; dan (9) pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS (2005) lebih melihat kemiskinan dari sisi individu/rumahtangga. Dalam penentuan rumahtangga yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPS menggunakan 14 indikator kemiskinan rumahtangga, yaitu: (1) jumlah anggota rumahtangga; (2) luas lantai bangunan tempat tinggal/kapita; (3) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas; (4) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas; (5) Fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus); (6) Sumber air minum; (7) Sumber penerangan utama; (8) Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari; (9) Frekuensi biasanya rumahtangga membeli daging/ayam/susu dalam seminggu; (10) Frekuensi biasanya rumahtangga makan dalam sehari; (11) Jumlah stel baju baru yang dibeli sebagian besar anggota rumahtangga dalam setahun; (12) Kemampuan berobat ke poliklinik/puskesmas saat ada anggota rumahtangga sakit; (13) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumahtangga; (14) kepemilikan barang berharga, yaitu barang dengan nilai paling sedikit Rp. 500.000,-.

Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS, 2006) juga mengukur kemiskinan di tingkat mikro, yaitu keluarga. Indikator kemiskinan KBKS adalah (1) umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari; (2) anggota keluarga memiliki pakaian yang

berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; (3) rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik; (4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan; (5) jika pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; (6) semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah; (7) umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (8) paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur; (9) seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun; (10) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² per kapita; (11) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan fungsi/tugasnya; (12) Ada seorang/lebih dalam keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; (13) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun melek huruf; (14) Pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi; (15) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama; (16) Sebagian penghasilan keluarga di tabung dalam bentuk uang atau barang; (17) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi; (18) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya; (19) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV; (20) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial; (21) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/lembaga di masyarakat. Keluarga yang tidak memenuhi satu atau lebih indikator ke-1 hingga ke-6 digolongkan sebagai keluarga miskin/pra Keluarga Sejahtera (KS). Jika memenuhi indikator ke-1 hingga ke-6 namun ada satu atau lebih tidak memenuhi indikator

ke-7 hingga ke-14, maka tergolong keluarga hampir miskin (KS I). Jika memenuhi indikator ke-1 hingga ke-14 namun ada satu atau lebih tidak memenuhi indikator ke-15 hingga ke-19, maka tergolong KS II. Jika memenuhi indikator ke-1 hingga ke-19 namun ada satu atau lebih tidak memenuhi indikator ke-20 hingga ke-21, maka tergolong KS III, selebihnya digolongkan sebagai KS III plus.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu indikator kemiskinan berbagai lembaga dan profil kecamatan se Kabupaten Bangkalan, penelitian dibagi dalam 2 tahap:

- (1) Identifikasi indikator kemiskinan regional berbagai sektor yang akan dijadikan sebagai dasar pembuatan peta kemiskinan: a. Mengklasifikasikan indikator kemiskinan utama berbagai lembaga menjadi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; b. Menurunkan setiap indikator kemiskinan utama menjadi indikator kemiskinan regional yang lebih operasional; c. Menentukan indikator kemiskinan regional terpilih sesuai ketersediaan data kuantitatif (sekunder).
- (2) Memanfaatkan analisis gerombol dan teknik skoring nilai standard baku (Z-score) untuk identifikasi gerombol kecamatan miskin.
 - a. Untuk memastikan tidak ada bias karena pengaruh perbedaan satuan indikator kemiskinan, data ditransformasikan menjadi *Z-score*.

Nilai *Z* indikator ke-*i* kecamatan ke-*j* didefinisikan sebagai berikut:

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_i}{\sigma_i}$$

X_{ij} = nilai indikator ke- i , kecamatan ke- j ;

\bar{X}_i = rata-rata indikator ke- i

σ_i = standar deviasi indikator ke- i

- b. Nilai Z ini dianalisis dengan analisis gerombol, sebuah analisis variabel ganda yang berguna untuk mengelompokkan n objek (kecamatan) menjadi k gerombol ($k \leq n$). Pada prinsipnya, analisis gerombol didasarkan pada ukuran kedekatan 'jarak' (nilai indikator kemiskinan) antar kecamatan. Semakin dekat jarak, maka kecamatan-kecamatan semakin mirip/homogen karakternya. Jarak kecamatan a dan b ($d(a,b)$) dihitung dengan fungsi jarak Euclides:

$$d(a,b) = \sqrt{\sum_{i=1}^m (a_i - b_i)^2}$$

dengan a_i = nilai indikator kemiskinan ke- i kecamatan a ; b_i = nilai indikator kemiskinan ke- i kecamatan b ; dan m =banyaknya indikator kemiskinan.

Hasilnya adalah k gerombol kecamatan.

- c. Untuk menentukan gerombol yang merupakan kantong kemiskinan, maka gerombol diurutkan berdasarkan total Z -score indikator-indikator kecamatan. Dengan memanfaatkan teknik transformasi data, harus dipastikan bahwa 'arah' nilai semua indikator harus sama, misalnya semakin tinggi nilai maka kondisi wilayah/kecamatan semakin tidak miskin atau sebaliknya. Kantong kemiskinan adalah kelompok/gerombol

- Terbatasnya akses terhadap air bersih (Bappenas) - Terbatasnya sarana dan prasarana (perumahan) yang diutamakan (World Bank)	- Jumlah pencemaran	---
	- Jenis pencemaran	---
	- % Rumah permanen	---
	- % Rumah tangga berlistrik	---
	- % Rumah tangga dengan sarana air bersih	√
	- % Rumah tangga dengan sarana buang air	√
	- % Rumah tangga dengan bahan bakar memasak minyak tanah/gas	---
	- Jarak kecamatan ke ibukota kabupaten	√
	- Lama tempuh dari kee ke ibukota kab	---
	- Panjang Sungai	√
- Rata-rata banyaknya hujan	√	

Catatan: Sumber data adalah Kecamatan dalam Angka 2006 (Data tahun 2005)

4.2. Gerombol Kecamatan Berdasarkan Indikator Kemiskinan Regional

Analisis gerombol terhadap nilai indikator setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan menghasilkan enam gerombol. Gerombol ke-1, 2, dan 3 masing-masing terdiri dari satu kecamatan, yaitu Kamal, Kokop dan Bangkalan. Gerombol ke-4 terdiri dari Kecamatan Modung, Blega, Galis, Tanah Merah, Socah, Burneh, Arosbaya, dan Konang. Gerombol 5 terdiri dari Tragah dan Sepulu. Sisanya, Kecamatan Labang, Kwanyar, Tanjung Bumi dan Klampis tergolong pada gerombol 6.

Untuk menentukan gerombol yang merupakan kantong kemiskinan, maka dilakukan penghitungan total skor indikator masing-masing kecamatan. Oleh karena sebelumnya telah ditentukan bahwa semakin tinggi skor semakin tidak miskin, maka semakin kecil total skor gerombol kecamatan, semakin miskin gerombol tersebut.

Tabel 2. Skor dan Total Skor Aspek Kemiskinan setiap Gerombol Kecamatan

Aspek Kemiskinan	Gerombol ke-					
	1	2	3	4	5	6
Kependudukan	4,96	-6,16	8,07	-0,96	-0,14	0,52
Ketenagakerjaan	2,08	-0,21	4,02	-0,90	1,25	-0,08
Ekonomi	5,00	-3,35	20,20	-1,63	-2,64	-0,47
Pendidikan	3,09	-6,12	10,94	-0,67	-1,01	-1,47
Kesehatan	-1,89	-8,10	0,50	0,09	4,80	-0,22
Sosial lainnya	-2,83	5,34	4,71	0,59	-4,83	-0,72
Lingkungan perumahan	0,92	0,25	7,48	-0,53	-0,70	-0,63
Total Skor	11,33	-12,34	55,92	-4,01	-3,27	-3,07
Banyaknya indikator negative	23	33	10	30	31	31
Banyaknya aspek negative	2	5	0	5	5	6

Skor menunjukkan posisi gerombol kecamatan. Skor nol (0) adalah rata-rata seluruh kecamatan. Jika nilai negatif, maka kondisi aspek yang bersangkutan relatif rendah (lebih miskin) dari kondisi rata-rata kecamatan. Sebaliknya untuk nilai positif yang menunjukkan kondisi lebih baik (tidak miskin). Skor setiap aspek adalah penjumlahan skor indikator-indikator dalam aspek yang bersangkutan. Sementara itu, total skor merupakan penjumlahan skor seluruh (7) aspek kemiskinan. Total skor negatif menunjukkan bahwa secara keseluruhan kondisi gerombol berada di bawah rata-rata/kondisi seluruh gerombol/kecamatan (lebih miskin), dan sebaliknya untuk total skor positif. Banyaknya indikator negatif mengacu pada banyaknya indikator berskor negatif dari total 45 indikator. Terakhir, banyaknya aspek negatif adalah banyaknya aspek bernilai negatif dari total 7 aspek.

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa gerombol kecamatan yang paling rendah / miskin kondisinya adalah gerombol ke-2, diikuti oleh gerombol ke-4, 5 dan 6. Sementara itu, gerombol 1 dan 3 tergolong gerombol yang 'tidak miskin'. Hal lain yang bisa disimpulkan adalah adanya kesenjangan yang cukup nyata yang diperlihatkan oleh rentangan / variasi nilai dari total skor. Gerombol tidak miskin mempunyai nilai positif yang sangat tinggi, sementara gerombol miskin mempunyai skor yang relatif sama. Ini berarti kesenjangan antara gerombol kaya dengan miskin sangat besar, namun kesenjangan antar gerombol miskin atau antara gerombol kaya tidak terlalu besar.

Dengan melihat anggota tidak gerombol, dapat diidentifikasi kecamatan-kecamatan yang miskin ataupun tidak miskin. Hanya Kecamatan Bangkalan dan Kamal yang tergolong kecamatan tidak miskin di Kabupaten Bangkalan. Selebihnya, memiliki total skor negatif yang berarti kondisinya berada di bawah rata-rata kecamatan dan dialami oleh sebagian besar kecamatan. Dengan kata lain, kemiskinan merata di Kabupaten Bangkalan. Sebaran spasial gerombol kecamatan berdasarkan indikator kemiskinan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar. Sebaran Spasial Gerombol Kecamatan Berdasarkan Indikator Kemiskinan Regional

Walaupun demikian, kita dapat tetap memilih gerombol yang lebih miskin di antara yang miskin. Jika ditetapkan dua gerombol terbawah, maka yang terkategori kecamatan kantong kemiskinan adalah Kokop, Modug, Bléga, Galis, Tanah Merah, Socah, Burneh, Arosbaya, Geger dan Konang. Secara spasial (**Gambar**) tampak bahwa kantong kemiskinan berada di kecamatan-kecamatan bagian tengah Kabupaten Bangkalan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- (1) Indikator yang digunakan sebagai patokan pembuatan peta kemiskinan sangat tergantung pada ketersediaan data (kuantitatif) yang tersedia.
- (2) Penentuan gerombol yang tergolong kantong kemiskinan atau tidak tergantung pada kriteria yang dipatok. Jika patokannya adalah gerombol yang relatif berada di bawah rata-rata kabupaten maka hanya Kecamatan Kamal dan Bangkalan saja yang terkategori 'tidak miskin'. Jika patokannya adalah 2 gerombol yang terendah, maka 10 dari 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan adalah kantong kemiskinan.
- (3) Peta kemiskinan di Kabupaten Bangkalan kriteria pematokan kemiskinan 2 gerombol terendah":

- a. Kantong-kantong kemiskinan meliputi Kecamatan Kokop, Modung, Blega, Galis, Tanah Merah, Socah, Burneh, Arosbaya, Geger, dan Konang.
- b. Kesenjangan sangat nyata antara gerombol kecamatan miskin dan tidak miskin, sementara variasi antar gerombol miskin relatif kecil. Dengan kata lain, kemiskinan hampir merata di seluruh Kabupaten Bangkalan.

5.2. Saran

- (1) Dengan alasan untuk pemerataan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, strategi pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan pada kecamatan miskin (kantong kemiskinan) perlu terus ditingkatkan.
- (2) 'Apa' yang harus dibangun di kecamatan-kecamatan miskin adalah aspek dan indikator kemiskinan yang memiliki nilai 'terendah'/terjelek dibandingkan dengan rata-rata kabupaten (aspek berskor negatif)
- (3) Indikator kemiskinan bersifat dinamis. Artinya, indikator yang digunakan untuk membuat peta kemiskinan dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan ketersediaan data dan kesesuaiannya dengan konsep kemiskinan yang mungkin saja terus berkembang karena dimensinya yang sangat banyak dan kompleks.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. Bangkalan dalam Angka Tahun 2005.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005, Blanko PSE05.RT. BPS Jakarta.

- Bappeda Kabupaten Bangkalan. 2007. Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Makalah yang disampaikan dalam Acara Pertemuan Multistakeholder Kabupaten Bangkalan. Tidak diterbitkan.
- Bappeda Kabupaten Bangkalan dan Eiro Consultant. 2007. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tragah, Konang, dan Kokop. Tidak diterbitkan.
- Ditjen Dikti. 2006. Panduan Pengelolaan Program Hibah DP2M Edisi VII.
- Gregorius, Safdan. 2007. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Artikel dalam www.kemendpt.go.id.
- Insan Hitawasana Sejahtera. 2004. Suara Akar Rumput tentang Kemiskinan, bagian kegiatan proyek Pengembangan Basis Data untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan. Tidak dipublikasikan.
- Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS), Kantor. 2006. Blanko Register Pendataan Keluarga.
- Madura Mandiri, Lembaga Swadaya Masyarakat. 2007. Urgensi Pembentukan TKPKD Kabupaten Bangkalan, Makalah yang disampaikan dalam Acara Pertemuan Multistakeholder Kabupaten Bangkalan. Tidak diterbitkan.
- Sumedi dan Supedi. 2004. Kemiskinan di Indonesia: Suatu Fenomena Sosial. ICASERD Working Paper No. 21.
- Todaro, Michael P. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, ed. 6, jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Toman, M.A., John Pezzey, dan Jeffrey Krautkraemer. 1996. Neoclassical Economic Growth Theory and Sustainability bab 7 dari *The Handbook of Environmental Economics* edited by Daniel W. Bromley. Massachusetts, USA. Blackwell Publishers Ltd.